

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap perjanjian akan menimbulkan konsekuensi bagi para pihak dalam perjanjian tersebut, atau biasanya disebut prestasi pihak yang tidak memenuhi komitmennya di dalam perjanjian biasa disebut melakukan wanprestasi.

Orang yang tidak memenuhi prestasi atau disebut wanprestasi, menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yakni, pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya. Ketiga, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Ketiga, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Praktek yang sering terjadi adalah perjanjian hutang-piutang, apalagi didalam dunia bisnis hutang piutang untuk modal kerja adalah hal yang lazim. Tidak dipungkiri kondisi banyak orang yang memulai usaha dengan modal pinjaman. Seseorang yang mempunyai bisnis lancar akan tergoda untuk mengembangkan usahanya. Apabila kekurangan modal pasti akan mencari pinjaman tentunya dengan perhitungan yang matang.

Karena banyaknya model-model pembiayaan dari bank seseorang dengan mudah mendapatkan modal kerja, juga yang sudah mempunyai modal besar tetapi tidak mempunyai konsep bisnis akan cenderung mencari pelaku

bisnis yang kekurangan modal untuk meminjamkan uangnya supaya bisa berkembang. Tentunya dalam meminjamkan modal ada perjanjian yang mengikat diantara pelaku bisnis tersebut.

Model pinjaman dari rekan kerja ini tentunya ada banyak keuntungan dan banyak kelemahan dari pengamatan saya model pinjaman seperti ini keuntungannya adalah perjanjiannya tidak terlalu kaku seperti diperbankan, karena pasti dalam meminjamkan modal sudah kenal dekat dengan yang meminjam modal cukup dengan perjanjian dibawah tangan tentang komitmen jatuh tempo pembayaran hutang langsung bisa terealisasi. Kelemahan dari model ini biasanya datang dari peminjam modal, karena menganggap sepele hal tersebut, peminjam akan lupa hutang tersebut setelah jatuh tempo baru ingat kalau mempunyai hutang.

Agar meningkat kekuatan pembuktiannya jika suatu saat terjadi masalah dalam perjanjian hutang tersebut hendaknya sebelum melakukan tanda tangan terhadap surat tersebut agar mendatangi notaris untuk melakukan legalisasi. Di dalam melakukan legalisasi notaris akan membacakan isi surat perjanjian. Dan memastikan kedua belah pihak paham akan isi hak dan kewajiban terhadap surat perjanjian tersebut. Apabila perjanjian tersebut telah terlanjur di tandatangani bisa dilakukan *warmaeking* atau register. Dari segi kekuatan memang perjanjian yang dilegalisasi akan lebih kuat daripada yang di register.

Hukum perjanjian di indonesia memberi keleluasaan bagi para pihak yang akan mengikatkan diri mengenai klausul perjanjian hutang piutang, asal

tidak melanggar undang-undang , ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan adanya perjanjian hutang piutang terdapat hubungan hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban bagi parapihak, sebagaimana yang sudah tertulis dan ditandatangani bersama dalam akta perjanjian hutang piutang dan bagi para pihak yang membuatnya adalah sebagai undang-undang. Akan tetapi kadang kala dalam perjanjian hutang piutang tersebut menemui kendala atau tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan karena salah satu pihak melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah bentuk pengingkaran terhadap prestasi yang telah dijanjikan. Apalagi perjanjian diantara teman biasanya lebih sering timbul wanprestasi.

Sikap profesionalitas hakim sangat memperngaruhi dalam pembuatan putusan terhadap sengketa, hakim harus menjunjung tinggi keadilan baik itu keadilan ditinjau dari yuridis, keadilan ditinjau dari filosofis dan keadilan ditinjau dari sosiologis.¹ Apabila hakim tidak melihat atau mengurangi salah satu unsur tersebut maka bisa dipertanyakan nilai keadilannya.

Pada putusan Perkara Nomor : 146/Pdt.G/2011/PN.Ska antara RIKAWATI, S.H., M.H., sebagai Penggugat melawan ANKY JOESTEDJO WALUYO, S.H., EVELYN MELIA TEJO KUSUMO dan HADI WALUYO sebagai Tergugat Serta PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. cq. Bank Negara Indonesia Cabang Solo Universitas Sebelas Maret, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami, Nomor 36 A, Surakarta, Kantor Badan Pertanahan Nasional Surakarta, berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara,

¹ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana , 2015), hlm.4

Nomor 29, Surakarta, Kantor Badan Pertanahan Nasional Sukoharjo, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, Nomor 310, Sukoharjo sebagai Turut Tergugat. Kasus wanprestasi yang dilakukan oleh Anky Jostedjo kepada Rikawati, awal mula terjadi perjanjian hutang adalah ketika sdr. Anky menceritakan usahanya kepada Rikawati dan disitu Anky mengaku kekurangan modal, karena status pertemanan akhirnya pada 16 Agustus 2006 terjadilah perjanjian hutang sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiah), dengan rincian 3 kali tahap pencairan yaitu pada tanggal 16 Agustus 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), tanggal 31 Agustus dan tanggal 15 september 2006 dengan besaran yang sama dengan waktu pinjaman selam 4 (empat) tahun dan bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung sejak tanggal penerimaan pinjaman.

Setelah jatuh tempo sdr. Anky tidak dapat memenuhi kewajibannya dan setelah diberi kelonggaran pun masih saja sama, tergugat mengaku kalau usaha yang dijalankan mengalami kemunduran dan tidak dapat mengembalikan pinjaman. Lebih terkejut lagi ketika mengetahui bahwa tanah yang dijaminkan kepada sdr. Rikawati ternyata telah melekat sita jaminan dari Bank Negara Indonesia cabang Surakarta yang merupakan turut tergugat. Akhirnya untuk melindungi kepentingannya karena merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta untuk mendapatkan kembali haknya.

Maka dari itu berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk mengambil judul **“PROSES PENYELESAIAN PERKARA**

**WANPRESTASI PADA PERJANJIAN UTANG-PIUTANG UNTUK
MODAL USAHA ANTAR REKAN KERJA (Studi Kasus: Perkara
Nomor 146/Pdt.G/2011/PN.Ska di Pengadilan Negeri Surakarta)”.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam hal menentukan pembuktian atas perkara wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang yang dijamin hak milik atas tanah ?
2. Bagaimana hakim dalam menentukan putusan atas perkara wanprestasi debitur atas utangnya terhadap kreditur yang telah terbukti ?
3. Bagaimana akibat hukum setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi pihak yang berperkara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah merujuk pada hal-hal yang hendak dicapai oleh penulis melalui rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang untuk modal usaha antar rekan kerja.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas perkara wanprestasi debitur terhadap

perjanjian utang-piutang untuk modal usaha antar rekan kerja yang telah terbukti.

3. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukumnya bagi kreditur dan debitur sebagai pihak yang berperkara.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penulisan ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dan menambah wawasan masyarakat mengenai perjanjian utang-piutang yang salah satu subyek hukumnya melakukan wanprestasi atas perjanjian tersebut. Disamping itu, juga dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai pengetahuan hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan perjanjian utang-piutang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Manfaat bagi Penulis

Bagi penulis sendiri, dengan adanya hasil dari penulisan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan, agar lebih mengetahui secara detail bagaimana proses penyelesaian perkara wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yang mana diselesaikan dan

diputus oleh hakim sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

3. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan

Dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum yang khususnya pada proses penyelesaian perkara wanprestasi atas utang-piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²

1. Metode Pendekatan

Penulis dalam hal metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode normatif, karena dalam penelitian ini yang diteliti adalah kaidah- kaidah, norma-norma, asas hukum, aspek hukum, dalam penyelesaian perkara wanprestasi dalam suatu perjanjian utang-piutang.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif.

Penelitian deskriptif yakni penelitian ini terbatas pada usaha mengungkap

² Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, hlm. 1

suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.³ Penulis menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai penyelesaian perkara wanprestasi perjanjian utang-piutang untuk modal usaha antar rekan kerja dan menggambarkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

3. Sumber Data

Guna mempermudah penulis maka penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Data Sekunder

Untuk mencari data sekunder yaitu dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, antara lain:

(i) Putusan Perkara Nomor : 146/Pdt.G/2011/PN.Ska di Pengadilan Negeri Surakarta.

(ii) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

(iii) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata

(iv) Yurisprudensi

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa literatur dari buku-buku, penelitian-penelitian

³ H.Ishaq, *Metode apaenelitian Hukum*. 2017, Bandung, Alfabeta, hlm. 20

sebelumnya, jurnal serta hasil-hasil dari seminar. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia yang mungkin dapat membantu penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan lebih detail mengenai baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dimana bahan hukum tersier dapat di dapat pada kamus-kamus dan situs web yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Primer

Data primer adalah data-data yang mana diperoleh secara langsung dari lapangan yakni warga masyarakat.⁴ Dalam penelitian penulis ini maka datanya sebagai berikut :

1) Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis telah memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta.

2) Subyek Penelitian

Dalam hal ini penulis akan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta mengenai proses penyelesaian perkara wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang untuk modal usaha antar rekan kerja.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*. 1986, Jakarta, UI-Pers, hlm. 12

4. Metode Pengumpulan Data

Pada metode pengumpulan data, yang dilakukan penulis dalam penelitian ini antara lain :

a. Penelitian Kepustakaan

Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat pada buku-buku pustaka maupun literatur yang berupa peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Pada metode ini adalah pengumpulan data. Penulis akan melakukan penelitian secara langsung berhadapan dengan obyek yang akan diteliti. Adapaun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

(i) Membuat dan Menyusun Daftar Pertanyaan

Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat serta menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber yang mana pertanyaan tersebut memiliki kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

(ii) Melakukan Wawancara / *Interview*

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dari pewawancara, untuk mendapatkan informasi

yang berkaitan permasalahan yang sedang diteliti, yakni Hakim Pengadilan Negeri Surakarta.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian yang dilakukan penulis ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif yakni dengan mengumpulkan data dari bahan-bahan hukum kemudian dianalisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Setelah itu penulis akan mempelajari dan memahaminya secara mendalam guna menjawab permasalahan secara mendalam guna menjawab permasalahan yang ada sehingga penulis dapat menarik suatu kesimpulan.

F. SISTEMATIKA PENELITIAN

Sesuai dengan pedoman skripsi maka penulis akan membagi tulisan ini dalam empat bagian. Yang mana antara bab satu dengan lainnya ditulis secara sistematis dan logis. Dalam setiap bab akan dibahas per sub pembahasan. Untuk lebih rinci sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Permasalahan
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode penelitian

G. Sistematika Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perjanjian Utang-piutang dengan Jaminan Hak Atas Tanah

1. Pengertian perjanjian utang-piutang
2. Pihak-pihak pada perjanjian utang-piutang
3. Jaminan hak milik atas tanah pada perjanjian utang-piutang
4. Perjanjian antara kreditur dan debitur dalam utang-piutang
5. Hak dan kewajiban kreditur dan debitur dalam perjanjian utang-piutang
6. Tanggungjawab hukum atas dasar wanprestasi

B. Tinjauan Formil mengenai Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi terhadap Perjanjian Utang-Piutang dengan Jaminan Hak Milik atas Tanah.

1. Pengertian perkara wanprestasi
2. Penyelesaian perkara wanprestasi
3. Penyusunan surat gugatan atas dasar wanprestasi
4. Pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri
5. Pemanggilan para pihak yang dilakukan oleh pengadilan negeri
6. Proses pemeriksaan perkara gugatan wanprestasi
 - a. Perdamaian
 - b. Pembacaan gugatan

- c. Jawaban tergugat
- d. Replik
- e. Duplik
- f. Pembuktian
 - 1) Pengertian pembuktian
 - 2) Beban pembuktian
 - 3) Alat bukti
 - 4) Kesimpulan pembuktian
- g. Putusan
 - 1) Pengertian putusan
 - 2) Macam-macam putusan
 - 3) Pertimbangan putusan hakim
 - 4) Pelaksanaan putusan hakim

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pertimbangan hakim dalam hal menentukan pembuktian atas perkara wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang yang dijamin dengan hak milik atas tanah
- B. Pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas perkara wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang yang dijamin dengan hak milik atas tanah yang telah terbukti.
- C. Akibat hukum setelah putusan terjadi dan setelah memiliki kekuatan hukum tetap atau mengikat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

Kemudian pada bagian yang terakhir adalah daftar pustaka.